BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENETAPAN *HADHĀNAH* KEPADA AYAH PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH

Secara umum, *Hadhānah* pada hukum positif dan hukum Islam tidak jauh berbeda, akan tetapi *Hadhānah* dalam hukum positif belum mempunyai rincian yang tegas yang hanya memberikan uraian berisi demi kepentingan terbaik anak. Bab ini menguraikan analisis terhadap dasar analisis hukum hakim dalam proses putusan perkara *Hadhānah*, terutama saat hak asuh anak dijatuhkan kepada ayah, dengan memperhatikan kondisi objektif para pihak, usia dan kebutuhan anak, serta prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam hal ini, pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

Ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib untuk mendidik dan menjaga anak. Dan dalam hal ini, hak *Hadhānah* menjadi hak orang tua, terutama ibu, dan anak. Ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki, misalnya, berpendapat bahwa hak *Hadhānah* adalah hak ibu, sehingga ibu memiliki hak untuk menggugurkannya. Namun, mayoritas ulama menganggap *Hadhānah* sebagai hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili hak-hak *Hadhānah* adalah

hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.¹⁵⁹

Informasi yang diperoleh dari fakta-fakta yang disajikan selama persidangan digunakan sebagai dasar putusan hakim. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini akan mendapatkan manfaat dari elemen-elemen ini, yang sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum putusan hakim. Oleh karena itu, putusan hakim perlu dipertimbangkan dengan cermat dan tepat. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan hakim jika putusan tersebut dilaksanakan secara tidak benar dan mengakibatkan kesalahan yang fatal.¹⁶⁰ Selain musyawarah, hakim juga memerlukan pembuktian untuk proses pengambilan keputusan. Proses pembuktian ini sangat penting dalam suatu persidangan karena di sini hakim berusaha memastikan dengan pasti bahwa peristiwa atau fakta yang disebutkan benar-benar terjadi agar dapat mengambil keputusan yang adil dan tepat. Hakim tidak dapat mengambil keputusan kecuali jika mereka dapat membuktikan kebenaran gugatan.¹⁶¹

Pada intinya, pertimbangan hakim mencakup hal-hal berikut, dalil-dalil yang tidak dipertentangkan atau substansi dari masalah dan fakta-fakta yang diakui. Analisis yuridis terhadap putusan yang mencakup semua aspek yang terkait dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Semua bagian dari tuntutan pihak

¹⁵⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2016). H, 15

¹⁶⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta Pustaka Publisher, T.T.). H 140

¹⁶¹ Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. H 141

penggugat harus dipertimbangkan dan dievaluasi satu per satu sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, serta dapat dikabulkan atau ditolak dalam amar putusan.¹⁶²

A. Argumentasi Hakim dalam Penetapan *Hadhānah* kepada Ayah

Dalam perkara-perkara yang dianalisis, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *Hadhānah* kepada ayah memiliki variasi yang mencerminkan situasi faktual masing-masing kasus. Secara normatif, ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁶³ menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibunya, kecuali apabila terdapat alasan yang kuat untuk menyerahkannya kepada ayah. Alasan ini harus mempertimbangkan kemaslahatan anak dan tidak semata-mata didasarkan pada posisi sebagai orang tua kandung.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁶⁴

¹⁶² Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. H 142

¹⁶³ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁶⁴ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta).2003.Hlm.189

Dalam pasal 105 pemeliharaan anak diatur dalam dua situasi. Pertama ketika anak berusia di bawah 12 tahun, ibunya bertanggung jawab atas perawatan anak. Kedua ketika anak mencapai usia 12 tahun, mereka memiliki opsi untuk memilih dibesarkan oleh ayah atau ibu mereka.

Menurut hukum Islam, ketika suami dan istri bercerai, ibu lebih diutamakan untuk mendapatkan hak asuh anak jika anak tersebut belum mencapai usia *mumayyiz* (dewasa), meskipun ayah tetap berperan dalam memenuhi kebutuhan anak. Ketika seorang anak mencapai usia *mumayyiz*, ia memiliki pilihan untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya, seperti yang diungkapkan dalam hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَائِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ،
عَنْ هَلَالِ بْنِ أَسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلِمَى - مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ - قَالَ: بَيْنَمَا
أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيْاهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، فَقَالَتْ:
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ - [وَأَرْطَنْتَ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ - زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
اسْتَهْمَا عَلَيْهِ، وَرَطَّنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وِلْدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَنِّ أَبِي عِنْبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ (اسْتَهْمَا عَلَيْهِ) فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وِلْدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: (هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ
أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ ابْنِهِمَا شِئْتَ) فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ

Hadits ini menjadi dalil bahwa seorang anak ketika sudah bisa mandiri atau sudah tamyiz berhak mendapatkan kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena pada usia tersebut anak sudah memiliki kecenderungan untuk memilih siapa yang lebih disukainya. Namun hadits ini tidak menjelaskan secara

kelas batasan usia *Hadhānah* hanya menjelaskan bahwa anak tersebut sudah *mumayyiz*.

Meskipun demikian, hak asuh ibu bisa gugur jika ibu menikah lagi, hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw :

سنن أبي داود ١٩٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْجِي¹⁶⁵

Menurut Imam al Mawardi sesuai dengan hadist tersebut, hak ibu akan gugur apabila ibu menikah lagi.¹⁶⁶ Dan dalam Kitab Al-Muhalla Ibn Hazm mengatakan hak ibu tidaklah gugur alam menjadi emegang hak asuh asalkan ibu dapat dipercaya dan dapat mengasuh anak degan baik tanpa keuangan perhatian terhadap keluarga barunya.¹⁶⁷ Hal ini dapat menjadi alasan beralihnya hakasuh ibub kepada ayah, dengan alasan pabila ibu menikah lagi maka kemungkinan perhatiannya beralih ke suami arunya atau bahkan mengorbankan dan mengalahkan anak kanung.¹⁶⁸

Dari beberapa kasus yang penulis teliti, Majelis hakim menetapkan hak asuh atas anak setelah mempertimbangkan dan memeriksa faktor-faktor sosial serta fakta-fakta yang ada di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa

¹⁶⁵ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy" *Az Al-Azdii As-Sijistani, Sunan Abi Dawud* (Asy Syifa, 1992). H 150

¹⁶⁶ Abi Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habibal-Mawardi, *Al-Hawial- Kabir* (Bairut:Daaral-Kitabal-Ilmiyah,1994),H.510

¹⁶⁷ Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al-Muhalla* (Mesir: Idarahthiba'ahal Muniriyah),H.146

¹⁶⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), H. 171

kepentingan anak telah terpenuhi. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa hak asuh ini tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh kepentingan orang tua, melainkan lebih kepada kesejahteraan anak, baik secara fisik, psikis, maupun spiritual. Berikut hasil analisis beberapa putusan yang penulis teliti:

1. Perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/Pa.Mtp

Dalam putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa hak asuh anak yang berumur 5 dan 8 tahun jatuh kepada ayah. Putusan ini berdasarkan pertimbangan hakim dari beberapa peraturan seperti, Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama suami istri dan majelis hakim berpendapat tidak ada alasan untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu. Pasal 105 KHI, yang memberikan hak *Hadhānah* kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*, tetapi tetap memperbolehkan pengadilan menentukan pihak lain apabila terjadi sengketa dan dalam pembuktian penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya sehingga majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam hal ini, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa anak-anak merasa aman, merasa nyaman, dan memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi lingkungan mereka.

Serta Yurisprudensi MA RI No. 110/K/AG/2007, yang menegaskan bahwa *Hadhānah* harus ditetapkan kepada pihak yang paling maslahat bagi anak, bukan hanya kepada ibu semata. Dalam perkara ini maslahat yang dimaksud adalah kondisi anak yang berada di pihak ayah dinilai baik dan tidak kekurangan, hal ini menjadi salah satu faktor hak asuh anak jatuh ke ayah.

Dalam putusan ini hakim menggunakan metode penafsiran sosiologis, yang mana untuk memahami suatu hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat, hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim yang mempertimbangkan keadaan anak yang mendapat sandang pangan papan yang terjamin jika diasuh oleh ayah dan kondisi psikologis anak yang merasa lebih nyaman jika bersama ayah. Dan ayah mampu menjamin kesejahteraan anak. Hal ini juga dibuktikan oleh tergugat ketika penggugat mengatakan di dalam fakta persidangan bahwa Penggugat pernah membuat pengaduan ke UPTD PPA Kota Banjarmasin karena Penggugat merasa tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak, padahal berdasarkan keterangan saksi XXXXX kalau saksi tidak menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, akan tetapi justru anak-anak merasa ketakutan apabila anak-anak bertemu dengan Penggugat dikarenakan Penggugat sering marah-marah kepada anak-anak dan selain itu pula menurut keterangan saksi XXXXX pernah Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menjemput XXXXX yang pada saat itu anak masih dalam keadaan tertidur lelap dan Penggugat dengan cara memaksa anak diangkut

ke sepeda motornya untuk dibawa. Selanjutnya anak XXXXX menangis karena ketakutan, sehingga hal tersebut membuktikan apabila Penggugat memang memiliki sifat keras kepala, egois yang dapat membuat psikologis anak terganggu.

Menurut penulis, hakim perlu memverifikasi secara profesional dengan menghadirkan psikolog atau ahli terhadap kecemasan dan ketakutan anak yang jika bertemu ibunya menjadi menangis dan ketakutan, bisa jadi hal ini disebabkan oleh anak yang dijauhkan secara halus dari ibu, sehingga terbentuklah rasa takut terhadap ibu, atau konflik yang terjadi pada orang tua yang secara tidak langsung disaksikan oleh anak-anak. Maka rasa takut yang ditimbulkan harus diuji secara objektif. Karena rasa takut anak bukan bukti mutlak ketidaklayakan selama tidak ada bukti kekerasan fisik dan psikis dari ibu terhadap anak.

Menurut penulis hak asuh ibu tidak harus gugur, karena dalam pasal 105 KHI menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibu, kecuali ibu terbukti tidak layak. Dalam kasus ini sebelum terjadi perselisihan, anak-anak tinggal bersama tergugat dan penggugat dengan harmonis, hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang ibu dapat dirasakan oleh anak-anak. Dalam hal ini rasa takut anak perlu diuji secara psikologis, maka akan lemah secara argumentatif. Maksudnya argumen anak yang tidak dekat dengan ibu akan terbantahkan.

Hal ini juga sesuai menurut wawancara bersama Ibu Hikmah yang bertugas sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, beliau mengatakan

bahwa aspek kepentingan terbaik bagi anak merupakan indikator utama dalam menentukan kebijakan terhadap putusan hak asuh anak. Faktor-faktor seperti psikologis juga sangat diperlukan untuk melihat kedekatan anak dan orang tua, faktor ekonomi, kesehatan serta pendidikan jangan sampai terabaikan.¹⁶⁹

2. Perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Dalam putusan ini, majelis hakim menimbang bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu. Berdasarkan pasal 105 KHI yang menyatakan anak belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu. Serta Pasal 41 dan 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anak. Dan Pasal 14 UU Perlindungan Anak yang mana anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri dan mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang Artinya: *“Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: “Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku”. Maka berkata Rasulullah: “engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain). (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, hadits shahih menurut Al-Hakim)¹⁷⁰*. Dari hadis tersebut jelas dikatakan bahwa ibu lebih berhak untuk memelihara anaknya sebelum ibunya menikah lagi. Ibu lebih diprioritaskan karena mempunyai

¹⁶⁹ Hasil Wawancara Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy. Pa Martapura, Rabu, 4 Juni 2025

¹⁷⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud (Jilid Dua) (Terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hlm. 47

kelayakan dalam mengasuh, karena ibu lebih memahami dan lebih bisa mendidik anak. Sosok ibu juga mempunyai kesabaran dalam mengasuh anak. Karena itulah ibu lebih diprioritaskan dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan anak. Hal ini juga selaras dengan bukti persidangan bahwa sebelum terjadi perselisihan, anak-anak tinggal bersama ibu dan kemudian bulan Mei 2024 dijemput oleh ibu terbanding dengan alasan untuk jalan-jalan dan tidak pernah dikembalikan sesuai dengan keterangan saksi. Dan Pembanding berusaha menjemput tapi tidak berhasil. dalam hal ini keberadaan anak pada pihak orang tua terbanding tidaklah tepat. Dan keadaan anak sebelum tinggal bersama terbanding dalam keadaan sehat dan penuh kasih sayang. Dan ibu juga tidak terbukti melakukan kekerasan kepada anak. Secara filosofis anak lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya. Terbanding juga diketahui jarang berada di rumah karena sibuk bekerja dan lembur sehingga *Hadhānah* menjadi terlantar.

Menurut Arizal Sastra Tjandi penentuan hak asuh dalam hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan kesejahteraan anak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada faktor usia dan jenis kelamin, tetapi juga pada kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan yang baik. Dalam hal ini, kebijakan yang mendahulukan kepentingan anak harus menjadi prioritas. Menurut Baidawi

Islam juga memberikan hak asuh anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan lingkungan yang mendukung pertumbuhannya.¹⁷¹

Dalam hal ini majelis hakim menggunakan metode penafsiran sosiologis yang mana pengambilan anak secara paksa tanpa didasari hukum yang mana anak sebelumnya merasa nyaman dan aman bersama ibu setelah diambil paksa menjadi cemas dan takut bertemu ibunya. Hal ini bisa menjadikan emosional anak dan ibu terputus

Menurut penulis, keputusan *Hadhānah* yang jatuh kepada ibu sudah sesuai, karena ayah selaku terbanding menyalahi asas perlindungan hukum serta prinsip keadilan karena memisahkan ibu dan anak secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan. Dalam hal ini majelis hakim juga harus menambah pertimbangan tentang aspek psikologis anak yang merasa takut dan cemas jika bertemu ibunya. Apakah hal ini karena trauma jangka panjang dan pengaruh pengasingan anak karena tidak tinggal bersama ibu.

3. Perkara Nomor 449/Pd.G/2020/PA.Bjb

Dalam putusan ini, majelis hakim menimbang bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayah berdasarkan pertimbangan hakim sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hadis Nabi SAW, anak yang belum *mumayyiz* seharusnya berada di bawah pengasuhan ibunya. Namun, Majelis menyatakan bahwa hak tersebut bisa gugur jika syarat-syarat *Hadhānah* tidak terpenuhi. Dan dalam hal ini majelis hakim mengambil rujukan dari Kitab Bajuri, yang menyatakan ibu lebih berhak atas anak pasca perceraian dan Kitab

¹⁷¹ Ahmad Masyhadi Dan Muhammad Aly Mahmudi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" 3, No. 1 (2024). H 41

Kifayatul Akhyar, yang menetapkan tujuh syarat *Hadhānah*, termasuk menjaga kehormatan dan dapat dipercaya (amanah). Oleh karena itu, hakim menilai ibu tidak layak memegang *Hadhānah* karena tidak memenuhi syarat, salah satunya diduga berselingkuh, pernah marah hingga anak trauma, dan sedang berstatus tersangka pada kasus pemalsuan tanda tangan. Karena figur orang tua sangat penting dalam pengasuhan anak sehingga dalam kasus ini, hak asuh anak diserahkan kepada ayah karena ayah dianggap mampu untuk mengasuh anak dan menjamin tumbuh kembang anak meski pada dasarnya hak asuh anak adalah hak ibu, dalam hal ini hakim menggunakan fakta lapangan untuk memberikan keputusan. Hal ini juga sesuai dengan bukti persidangan yang mana Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini dapat memberikan contoh yang buruk kepada anak.

Dalam hal ini dalam pertimbangan majelis hakim menolak penggugat sebagai hak asuh anak karena dianggap tidak layak. Akan tetapi dalam amar putusan majelis hakim tidak menentukan siapa yang menjadi pengasuh agar status pemegang hak asuh berkekuatan hukum.

Pada putusan ini majelis hakim menggunakan metode pengkonkretan hukum (*Rechtsvervijsnings*) yang merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkungannya.¹⁷² Hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim yang mengacu

¹⁷² Ahmad Ali, Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, H. 197

pada Pasal 105 KHI bahwa hak asuh anak berada di bawah ibu dan bisa gugur jika syarat-syarat *Hadhānah* tidak bisa terpenuhi.

Pada putusan ini berkaitan juga dengan wawancara bersama Ibu Hikmah yang mengatakan bahwa jika ibu terbukti tidak layak untuk menjadi pengasuh di persidangan, maka hak asuh anak akan jatuh ke ayah.¹⁷³

Menurut penulis, putusan majelis bersifat fleksibel dengan fakta dan bukti di persidangan, hakim tidak hanya mengacu pada Pasal 105 KHI yang mengatakan hak asuh anak jatuh kepada ibu, akan tetapi juga memperhatikan aspek filosofis apabila syarat-syarat *Hadhānah* tidak terpenuhi maka hak asuh akan gugur. Hal ini terbukti dengan penalaran hukum dengan melihat ibu yang diduga berselingkuh dan terlibat kasus sampai dijadikan tersangka dapat menggugurkan syarat-syarat menjadi pemegang hak asuh anak. Dalam hal ini, majelis hakim juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak yang sebelumnya tinggal bersama ibu, bukan hanya berpatok pada moral ibu dan kehormatan ibu padahal bukan kasus pidana. Hakim juga harus memperhatikan kebutuhan emosional anak yang masih berusia 2,5 tahun terhadap ibu. Dan hakim perlu mempertimbangkan tindakan ayah yang membawa anak tanpa izin keluar pulau.

4. Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Dalam putusan ini, hakim Majelis Hakim PTA Banjarmasin secara eksplisit menggunakan pendekatan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam: Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.

¹⁷³ Hasil Wawancara Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy., Pa Martapura, Rabu, 4 Juni 2025

UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 KHI, Kitab-kitab fiqh klasik (Bajuri, de Al-Fiqh al-Islami) Hakim mempertimbangkan usia anak yang masih sangat kecil (2,5 tahun), kebutuhan akan kasih sayang ibu. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan ayah yang membawa kabur anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Hal ini masuk ke dalam bentuk pengabaian tanggung jawab orang tua. Dan dalam hal ini, hakim masih menjaga dan menghormati hak ayah untuk bertemu dan mencintai anaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 yang berbunyi : (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik anak. (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.¹⁷⁴

Dalam hal ini, Ibu Martina selaku Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat bahwa kedekatan anak menjadi pertimbangan hakim mana yang terbaik dan jika memungkinkan dapat dilakukan pemeriksaan setempat untuk melihat dan menilai kondisi anak.¹⁷⁵

Menurut penulis hal ini sudah berkesesuaian terhadap aspek filosofis pemegang hak asuh anak yang ditetapkan jatuh kepada ibu pada Pasal 105 KHI.

¹⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tentang hak Anak Pasal 59

¹⁷⁵ Hasil Wawancara Ibu Dr. Martina Purnanisa, Lc. M.Sy, Pengadilan Agama Banjarbaru, Jumat, 13 Juni 2025

Dan menjaga kepentingan terbaik anak, karena anak yang masih berusia 2,5 tahun memerlukan kedekatan emosional dengan ibu dan juga ayahnya.

5. Perkara Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan hak asuh anak jatuh kepada ayah sesuai hasil kesepakatan mediasi. Tetapi hak penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu juga berimbang dengan memberikan akses seluas-luasnya untuk ibu bertemu. Namun dalam hal ini, ternyata Amar Putusan tidak jatuh kepada ayah, melainkan kepada ibu.

Menurut penulis, kesalahan pada amar putusan dapat membuat kekeliruan, padahal hasil kesepakatan sudah dibuat dan dituangkan dalam hasil mediasi. Dan dalam pembuktian perkara, sebagian gugatan Penggugat tidak dibuktikan karena mencapai kesepakatan mediasi sebagian.

Dalam mediasi hak asuh jatuh kepada ayah. Padahal dalam perkara gugatan penggugat mengatakan tergugat sering mabuk-mabukkan, tidak sering beribadah. Hal ini dapat mencerminkan sikap yang tidak pantas jika dijadikan contoh ketika mengasuh anak. Dalam hal ini, hukum Islam mengharuskan orang tua yang mengasuh anak untuk memiliki moralitas yang baik, sehingga dapat memberikan teladan yang baik kepada anak. Jika salah satu orang tua terbukti memiliki akhlak yang buruk atau terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, hak asuh dapat diberikan kepada orang tua yang lebih baik secara moral.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Masyhadi Dan Mahmudi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." H, 42

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 31 ayat 4 yaitu : Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Sejalan dengan wawancara dengan ibu Martinah, beliau mengatakan bahwa hak asuh anak dapat dilihat dari seberapa besar masalah dan kecilnya mudharat antara kedua orang tua.¹⁷⁷ Dalam hal ini, jika dilihat dari gugatan yang tidak dilanjutkan bahwa ayah sering mabuk-mabukkan membuat contoh yang tidak baik terhadap anak.

6. Perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm

Dalam putusan ini, majelis hakim mengacu pada hasil mediasi dan jawab menjawab serta reflik duplik para pihak yang mana hak asuh anak yang berumur 11 tahun dan 3 tahun jatuh kepada ayah. Serta membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Dalam hal ini majelis hakim memberikan koreksi penting terhadap kesalahan substantif dalam amar putusan tingkat pertama yang bertentangan dengan pertimbangan hukum dan hasil mediasi. Hakim Tingkat Banding dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm memberikan koreksi penting terhadap kesalahan substantif dalam amar putusan tingkat pertama yang bertentangan dengan pertimbangan hukum dan hasil mediasi. Putusan banding menunjukkan

¹⁷⁷ Hasil Wawancara Ibu Dr. Martina Purnanisa, Lc. M.Sy, Pengadilan Agama Banjarbaru, Jumat, 13 Juni 2025

kepatuhan pada asas kepastian hukum, perlindungan anak, serta penghargaan terhadap kesepakatan mediasi sebagai instrumen hukum yang sah.

Menurut penulis, kesepakatan mediasi yang banyak digunakan untuk mengambil keputusan hak asuh anak seharusnya tidak dianggap mutlak. Hal ini dikarenakan ibu tidak terbukti melakukan pelanggaran moral atau menelantarkan anak, sehingga ibu memiliki hak yang lebih besar untuk menjadi pengasuh utama di bawah hukum syariah dan hukum konstitusional. Dan dalam hal ini, menurut kesepakatan mediasi, keadaan buruk sang ayah, sebagaimana dibuktikan oleh gugatan penggugat dibuktikan lebih lanjut di pengadilan.

Di hukum Islam, *Hadhānah* diberikan kepada orang yang paling mampu menjamin keselamatan fisik, emosional, dan moral anak. Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa *Hadhānah* dapat berpindah apabila pengasuh memiliki akhlak tercela atau membahayakan anak. Hal ini searah dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa apabila anak belum *mumayyiz*, maka hak *Hadhānah* jatuh kepada ibu, kecuali apabila terbukti tidak layak sebagai pengasuh.²

Matrik Putusan Penetapan *Hadhānah*

No.	Nomor Perkar a	Hak Asuh Diberikan Kepada	Alasan/Pertimbangan Hakim	Dasar Hukum Putusan	Amar Putusan
1	551/Pdt .G/2024/PA.Mtp	Ayah (Tergugat)	Anak tinggal dengan ayah sejak Mei 2024, tumbuh sehat dan nyaman, ibu tidak dapat membuktikan lebih	Pasal 105 KHI, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU	Ditolak

			masalah, hakim prioritaskan kepentingan anak.	No. 35 Tahun 2014, Yurisprudensi MA No. 110/K/AG/2007	
2	55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm	Ibu (Terbanding)	Anak belum <i>mumayyiz</i> , secara normatif <i>Hadhānah</i> ada pada ibu yang dianggap layak secara moral dan keagamaan.	Pasal 105 KHI, Kitab Bajuri, UU Perlindungan Anak, SEMA No. 1 Tahun 2017	Dikabulkan
3	449/Pdt.G/2020/PA.Bjb	Ayah (Tergugat)	Ibu tidak dapat menjaga kehormatan dan marah kepada anak, sehingga dianggap tidak layak secara moral dan emosional.	Pasal 105 KHI, Kitab Bajuri, Kifayatul Akhyar, Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002	Ditolak
4	22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm	Ibu (Penggugat)	Anak berusia 3 tahun butuh kasih sayang ibu, ayah membawa anak tanpa izin dan menghalangi hubungan ibu-anak.	Pasal 105 KHI, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014, Kitab Bajuri, SEMA No. 1 Tahun 2017	Dikabulkan
5	651/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Ayah (Tergugat)	Berdasarkan kesepakatan mediasi, anak berada di bawah pengasuhan ayah; ibu tetap diberi akses.	SEMA No. 1 Tahun 2017, asas kepentingan terbaik anak, hasil mediasi	Ditolak
6	12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm	Ayah (Tergugat)	Hakim tingkat pertama keliru karena amar tidak sesuai kesepakatan mediasi, demi kepastian hukum, hak asuh diberikan ke ayah.	Pasal 156 KHI, asas kepastian hukum, hasil mediasi	Dikabulkan

Tabel 1.1

Dalam beberapa situasi, kasus *Hadhānah* menunjukkan keragaman pendekatan dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Keragaman ini mencerminkan dinamika pendekatan hukum normatif, pertimbangan fakta di lapangan, dan kesepakatan para pihak selama proses mediasi. Namun, tidak semua putusan konsisten dalam menjaga prinsip dasar *Hadhānah*, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip utama dalam hukum Islam dan hukum negara.

B. Pendekatan *Maqāshid al-syarī'ah* terhadap Dasar Pertimbangan Hakim

Ulama berpendapat bahwa peran dalam mendidik dan merawat anak adalah suatu kewajiban. Hak asuh anak (*Hadhānah*) dalam konteks ini menjadi hak orang tua, terutama ibu, serta hak bagi anak itu sendiri.¹⁷⁸ Ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki, menyatakan bahwa hak *Hadhānah* dapat digulingkan oleh ibu karena itu merupakan hak bersama antara orang tua dan anak. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa hak *Hadhānah* merupakan hak bersama antara orang tua dan anak. Hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak adalah salah satu contoh hak *Hadhānah*, menurut Wahbah Zuhaili. Hak atau kepentingan si anak adalah yang paling penting dalam kasus konflik.¹⁷⁹

Adapun dasar hukum *Hadhānah* adalah QS. Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

¹⁷⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. H 15

¹⁷⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁸⁰

Hukum *Hadhānah* (pengasuhan anak) memiliki status hukum wajib, karena tanpa pemeliharaan yang layak, keselamatan dan kesejahteraan anak dapat terancam. Kewajiban ini sejalan dengan kewajiban memberikan nafkah kepada anak, sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua dalam menjamin tumbuh kembang serta perlindungan anak secara menyeluruh.¹⁸¹ Islam menetapkan bahwa pelaksanaan *Hadhānah* wajib untuk orang tua. Sebagaimana orang tua berkewajiban memelihara anak selama berada dalam ikatan perkawinan, maka kewajiban tersebut tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Pengasuhan yang tidak optimal dari kedua orang tua pasca perceraian berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan anak, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun perkembangan sosialnya.

Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak menurut hukum Islam:

- a. Usia anak, menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak. Menurut Mazhab Syafi'i yang banyak di ikuti di Indonesia, anak yang masih kecil, terutama yang belum mencapai usia tujuh tahun, lebih baik diasuh oleh ibu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu, adalah orang yang lebih mampu memberikan kasih sayang, perawatan, dan perhatian yang lebih besar pada anak-anak yang masih kecil. Namun, apabila anak tersebut sudah memasuki usia tujuh tahun atau lebih,

¹⁸⁰ *Quran Hijrah, Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*. H 38

¹⁸¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyi Al-Kattani*. H 825

maka hak asuh anak dapat beralih kepada ayah, meskipun ibu tetap memiliki hak untuk bertemu dan memberikan perawatan secara berkala.¹⁸²

- b. Kesehatan dan kemampuan orang tua, hukum Islam mengutamakan kondisi yang memungkinkan anak memperoleh perawatan yang baik dan layak. Jika orang tua yang mengajukan hak asuh anak tidak mampu memberikan perawatan yang memadai, maka hak asuh dapat diberikan kepada pihak lain, misalnya kepada kerabat yang lebih mampu secara fisik dan finansial.¹⁸³
- c. Kedudukan sosial dan akhlak orang tua, hukum Islam mengharuskan orang tua yang mengasuh anak untuk memiliki moralitas yang baik, sehingga dapat memberikan teladan yang baik kepada anak. Jika salah satu orang tua terbukti memiliki akhlak yang buruk atau terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, hak asuh bisa diberikan kepada orang tua yang lebih baik secara moral.¹⁸⁴
- d. Kebutuhan anak juga menjadi faktor penting dalam penentuan hak asuh. Anak yang masih kecil membutuhkan perhatian penuh dan lingkungan yang stabil. Oleh karena itu, faktor kenyamanan dan kesejahteraan anak menjadi dasar pertimbangan dalam hukum Islam. Apabila salah satu orang tua terbukti tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, maka hak asuh bisa diberikan kepada pihak lain yang dianggap lebih mampu. Dalam hukum Islam terdapat beberapa pembatasan terhadap hak asuh, yang utamanya berkaitan dengan kesesuaian karakter orang tua dalam menjaga anak. Orang

¹⁸² Masyhadi Dan Mahmudi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." H 42

¹⁸³ Masyhadi Dan Mahmudi.

¹⁸⁴ Masyhadi Dan Mahmudi.

tua yang memiliki cacat fisik atau mental, atau yang tidak mampu memberikan perhatian yang cukup, tidak disarankan untuk diberikan hak asuh anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan fisik dan mentalnya.¹⁸⁵

Islam menganjurkan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan emosional manusia, sebagai instrumen untuk mengurangi ketegangan, sarana keterlibatan sosial, dan sebagai metode untuk keharmonisan dan persatuan antar keluarga. Perkawinan dalam Islam juga didorong untuk mendorong prokreasi dan melestarikan keturunan sebagai tujuan syariah. Suami istri memiliki tanggung jawab untuk memberikan penguatan positif terhadap perilaku keturunannya dan menghindari hal-hal yang tidak produktif. Kebutuhan dasar anak atas keamanan, kenyamanan, dan perkembangan dirinya juga merupakan salah satu tanggung jawab orang tua.¹⁸⁶

Kondisi keluarga harmonis yang dicita-citakan kerap kali tidak dapat terpenuhi. Terdapat banyak penyebab dan alasan yang memicu terjadinya perceraian dalam ikatan perkawinan. Faktor karakter, usia, status, pendidikan, atau agama seseorang tidak luput dari pemicu permasalahan di antara umat.¹⁸⁷

Penerapan *hifzh al-din* (menjaga agama) dalam *maqāshid al-syarī'ah* menghendaki pemberian hak asuh anak kepada salah satu orang tua yang memiliki

¹⁸⁵ Masyhadi Dan Mahmudi.

¹⁸⁶ Wahyudi, Tegar Sukma, And Toto Kushartonomor "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." (Jurnal Dialektika Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2020), H. 59.

¹⁸⁷ Ayesha Gul, Dkk., "Divorce: Causes And Consequences In Islamic Perspective", (Palarch Journal Of Arcaeology Of Egypt, Volume 18 Nomor 4, 2021), H. 6139.

pengetahuan agama yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kondisi tersebut didasarkan kepercayaan bahwa hak asuh anak terkait erat dengan kekuasaan karena seorang anak yang berada dalam pengasuhan seseorang akan terpengaruh oleh orang tua yang memiliki hak asuh dengan berbagai cara.¹⁸⁸

Selain untuk menjaga agama dan kesehatan fisik anak yang akan diasuh oleh salah satu dari kedua orang tuanya, *hifzh al- 'aql* (pemeliharaan akal) juga menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang lebih berhak menjadi pengasuh setelah perceraian, ibu atau ayah. Menurut Ahmad al-Mursi Huasian Jauhar, akal adalah sumber petunjuk dan pengetahuan. Akal yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Akal yang cemerlang yang dimiliki manusia akan dengan jelas mengenali mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Manusia akan merasa aman dan nyaman jika akalnya berfungsi dengan baik. Islam mengedepankan perlindungan terhadap akal dari segala hal yang dapat membahayakannya. Pola asuh seorang anak yang masih dalam pengasuhan salah satu orang tuanya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak di masa depan karena bagaimana ia dididik, diperlakukan, atau pendidikan apa yang ditempuhnya. Tentu saja, hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana ia dibesarkan dan lingkungan tempat ia dibesarkan. Ketika menetapkan yang berhak memiliki hak asuh anak harus memprioritaskan eksistensi agama daripada kepentingan pribadi orang tua. Bahwa hak asuh anak perlu diserahkan kepada salah satu orang tua yang memiliki agama, perilaku, dan kebiasaan yang lebih baik

¹⁸⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasyid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), H. 16.

daripada orang tua lainnya.¹⁸⁹ Berikut hasil analisis beberapa putusan yang penulis teliti:

1. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Dengan mempertimbangkan dasar hukum dari Pasal 105 KHI, Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Yurisprudensi MA No. 110/K/AG/2007. Hak asuh diberikan kepada ayah sebab anak sudah menetap bersama ayah semenjak Mei 2024 dan terbukti tumbuh sehat serta nyaman. Sementara ibu tidak dapat membuktikan bahwa pengasuhannya lebih maslahat. Hakim menekankan bahwa penetapan hak asuh harus berdasarkan kepentingan terbaik anak. Putusan ini mencerminkan *maqāshid al-syarī'ah* melalui *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan). Hakim mempertimbangkan kondisi faktual anak yang menunjukkan stabilitas emosional dan tumbuh kembang yang baik bersama ayah. Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha bahwa salah satu syarat *Hadhānah* adalah kemaslahatan anak secara lahir dan batin.

Akan tetapi menurut penulis, dalam hal ini hakim juga perlu melihat kemaslahatan anak dalam kedekatan anak kepada ibu sebelum lama berpisah, karena ketika sebelum berpisah anak menjalin kedekatan yang baik dengan ibu. Hal ini juga dapat menjadi penilaian *maqāshid al-syarī'ah* dalam aspek *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa). Karena anak yang belum *mumayyiz* bisa lebih dekat dengan ibu.

¹⁸⁹ Ali Akbar, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Hadonah Bagi Ibu Murtaad Berdasarkan Tinjauan Maqosid Syariah," (Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 1, 2022), H. 41.

2. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Dalam putusan ini, hakim menggunakan dasar putusan Pasal 105 KHI, UU Perlindungan Anak, SEMA No. 1 Tahun 2017, Kitab Hasyiyah al-Bajuri. Yang mana hak asuh di serahkan kepada ibu karena anak belum *mumayyiz*. Ibu dianggap layak secara moral dan keagamaan. Putusan ini menekankan norma klasik bahwa pengasuhan anak usia dini berada pada ibu, sebagaimana disebutkan dalam literatur fikih klasik. Dari perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, keputusan hakim menunjukkan perhatian terhadap *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-nafs* karena anak berada dalam masa pembentukan karakter awal yang sangat membutuhkan sentuhan keibuan dan lingkungan yang religius.

3. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Pada perkara ini, hakim menggunakan dasar Pasal 105 KHI, Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002, Kitab Hasyiyah al-Bajuri, dan Kifayat al-Akhyar. Hak asuh di dapatkan oleh ayah sebab ibu dianggap tidak layak secara moral dan emosional, ia tidak mampu menjaga kehormatan dan bahkan memarahi anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek psikologis dan stabilitas emosi anak.

Dari *maqāshid al-syarī'ah*, keputusan ini mengarah pada *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Ketidaklayakan ibu secara moral menjadi alasan mendasar bahwa masalah anak lebih besar jika diasuh oleh ayah.³

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* “Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada mengambil kemashlahatan”.¹⁹⁰ Hal ini berkaitan dengan ibu yang dinyatakan tidak layak oleh hakim menjadi pemegang hak asuh karena mafsadah ibu berurusan dengan tindak pidana dan dapat memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak walaupun maslahatnya ibu mempunyai ikatan batin yang kuat terhadap anak dan dapat merawat anak.

4. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Putusan ini berdasarkan Pasal 105 KHI, Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014, Kitab Bajuri, SEMA No. 1 Tahun 2017. Putusan ini menetapkan bahwa anak berusia 3 tahun harus diasuh oleh ibu karena membutuhkan kasih sayang dan perhatian emosional yang lebih tinggi. Ayah dinilai telah membawa anak tanpa izin dan menghalangi hubungan anak dengan ibunya.

Hakim menegaskan pentingnya menjaga hubungan ibu-anak, yang merupakan wujud *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl*. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menerapkan norma hukum formal tetapi juga asas moral dalam *maqāshid al-syarī‘ah*.⁴

5. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Putusan ini berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017, *asas best interest of the child*, hasil mediasi pengadilan. Dalam perkara ini, putusan ditetapkan berdasarkan

¹⁹⁰ Imam Musbikin, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

hasil mediasi antara kedua pihak. Anak tetap berada bersama ayah, tetapi ibu diberikan hak akses untuk berkomunikasi dan bertemu anak. Hal ini menunjukkan kemaslahartan bersama, yakni menjaga stabilitas hidup anak dan tetap menjamin hubungan emosional dengan kedua orang tua. Pendekatan ini sejalan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan.⁵

Menurut penulis, hakim juga harus memperhatikan aspek gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa ayah sering mabuk-mabukkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dan hasil mediasi bisa saja diperbaiki, karena mengingat ayah akan memberikan contoh yang kurang baik terhadap perilaku anak.

6. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm

Putusan banding ini membatalkan amar putusan tingkat pertama karena tidak sesuai dengan hasil mediasi. Hakim menetapkan hak asuh kepada ayah berdasarkan pertimbangan kepastian hukum. Secara *maqāshid*, hal ini menunjukkan bahwa *hifzh al-nafs* tetap diperhatikan, tetapi juga ditambah dengan *hifzh al-'aql* (menjaga akal) dalam konteks menjaga rasionalitas putusan dan komitmen hukum. Ini penting agar anak tidak menjadi korban dari inkonsistensi hukum.

Putusan ini mencerminkan prinsip keadilan sebagai konsistensi dan rasionalitas. Aristoteles memandang keadilan sebagai tindakan memberikan pada masing-masing pihak apa yang diterima secara proporsional.¹⁹¹ Dengan membatalkan putusan pertama yang tidak sesuai hasil mediasi, hakim menegaskan

¹⁹¹ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Dan Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," T.T. H 18

nilai rasionalitas dan konsistensi hukum, menghindari kontradiksi yang dapat merugikan anak.

Matrik Putusan Hadhānah Perspektif Maqāshid al-syarī‘ah

No	Nomor Putusan	Amar / Ringkasan Putusan	Analisis Maqāshid al-syarī‘ah
1	551/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Hak asuh diberikan kepada ayah karena anak telah lama tinggal bersama ayah, terbukti sehat dan nyaman. Ibu tidak dapat membuktikan pengasuhan yang lebih maslahat.	Menunjukkan penerapan <i>hifzh al-nafs</i> (perlindungan jiwa) dan <i>hifzh al-nasl</i> (penjagaan keturunan) dengan mempertimbangkan stabilitas emosional dan kesejahteraan anak. Putusan mengutamakan kemaslahatan nyata anak sesuai prinsip <i>best interest of the child</i> .
2	55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm	Hak asuh diberikan kepada ibu karena anak belum <i>mumayyiz</i> dan ibu dinilai layak secara moral dan agama.	Menggambarkan <i>hifzh al-nafs</i> , <i>hifzh al-nasl</i> , dan <i>hifzh al-din</i> . Menekankan kebutuhan kasih sayang keibuan pada usia dini sesuai norma fikih klasik untuk mendukung pembentukan karakter awal anak dalam lingkungan yang religius dan bermoral.
3	449/Pdt.G/2020/PA.Bjb	Hak asuh diberikan kepada ayah karena ibu dianggap tidak layak secara moral dan emosional, serta sering memarahi anak.	Memenuhi <i>hifzh al-nafs</i> dengan melindungi keselamatan psikologis anak dan <i>hifzh al-‘ird</i> (menjaga kehormatan). Hakim memilih pengasuhan yang lebih maslahat dengan mencegah mudarat

			lebih besar, sesuai konsep <i>al-maslahah al-mursalah</i> .
4	22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm	Hak asuh diberikan kepada ibu karena anak usia 3 tahun membutuhkan kasih sayang lebih tinggi. Ayah dinilai membawa anak tanpa izin dan menghalangi hubungan anak dengan ibunya.	Menegaskan <i>hifzh al-nafs</i> dan <i>hifzh al-nasl</i> melalui perlindungan kebutuhan emosional anak. Putusan menegaskan pentingnya menjaga hubungan ibu-anak untuk mendukung perkembangan jiwa dan keturunan secara seimbang.
5	651/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Anak tetap diasuh ayah sesuai hasil mediasi, dengan ibu mendapat hak akses untuk berkomunikasi dan bertemu anak.	Menggambarkan <i>hifzh al-nafs</i> , dan <i>hifzh al-nasl</i> . Menjaga stabilitas pengasuhan anak sekaligus menjamin hubungan emosional dengan kedua orang tua, menghindari konflik berkepanjangan.
6	12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm	Membatalkan putusan tingkat pertama yang tidak sesuai hasil mediasi, menetapkan hak asuh kepada ayah demi kepastian hukum.	Menekankan <i>hifzh al-nafs</i> , <i>hifzh al-'aql</i> , dan <i>hifzh al-nasl</i> . Putusan menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak, rasionalitas dan kepastian hukum sebagai bagian dari upaya menghindari ketidakpastian yang merugikan anak.

Tabel 1.2

Dalam hal ini, terlihat bahwa penetapan hak asuh kepada ayah dalam sejumlah perkara dilakukan dengan mengutamakan prinsip kemaslahatan anak sebagai tujuan pokok. Dari perspektif Maqāshid al-syarī‘ah, langkah tersebut mencerminkan upaya untuk mewujudkan *hifzh al-nafs*, yakni menjaga keselamatan

dan kesejahteraan jiwa anak, serta *hifzh al-nasl* yaitu menjamin keberlanjutan keturunan dengan menyediakan lingkungan yang aman, stabil, dan bermoral. Hakim tidak hanya menilai berdasarkan norma hukum semata, tetapi juga merujuk pada fakta-fakta yang terpapar di persidangan, seperti kesaksian para saksi, bukti dokumenter mengenai kondisi kehidupan anak, dan hasil pemeriksaan sosial. Faktor-faktor seperti lamanya anak tinggal bersama ayah, perkembangan positif anak selama pengasuhan tersebut, serta penilaian terhadap ketidakmampuan ibu dalam aspek moral dan emosional, menjadi pertimbangan penting dalam menentukan siapa yang lebih layak menjadi pengasuh.

Selain itu, pengesahan hasil mediasi oleh pengadilan menunjukkan penerapan *hifzh al-'aql*, yakni menjaga akal sehat dengan memberikan kepastian hukum dan rasionalitas dalam penyelesaian perkara demi menghindari konflik berkepanjangan. Dalam konteks hukum Islam, penyerahan hak asuh kepada ayah dalam kondisi tertentu sesuai dengan prinsip *maqāshid*, yaitu memilih pola pengasuhan yang lebih membawa manfaat dan mencegah mudarat bagi anak. Dengan mengintegrasikan fakta-fakta persidangan ke dalam pertimbangan yuridis, pengadilan menunjukkan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Hal ini menegaskan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada norma hukum positif secara mekanistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai *Maqāshid al-syarī'ah* untuk melindungi kepentingan terbaik anak secara menyeluruh. Dengan demikian, putusan-putusan tersebut memperlihatkan adanya sinergi antara hukum negara dan prinsip-prinsip Islam dalam upaya menjamin kesejahteraan anak di masa depan.